

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Literature Review

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah tak terlepas dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Literature Review merupakan sebuah uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian yang terkait yang didapatkan untuk bahan acuan untuk dijadikan sebagai landasan kegiatan penelitian dalam menyusun sebuah kerangka berpikir yang terkait dari rumusan masalah yang akan diteliti guna mengklarifikasi hasil dari sumber-sumber yang dikaji oleh penulis yang ada dalam penelitian ini.

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan seluruh penelitian-penelitian yang ada terdahulu yang relevan dengan topik ataupun masalah yang diangkat pada penelitian. Adapun literatur-literatur yang didapat sebelumnya bersumber dari jurnal ilmiah, sumber online, berita resmi dan hasil laporan penelitian. Tujuan dari literatur review yakni untuk memberikan gambaran mengenai diplomasi bilateral Indonesia-China dalam pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selain itu, fungsi dari sebuah literature review yakni menjelaskan secara rinci antara variabel bebas dengan variabel terikat serta hubungannya antara kedua variabel tersebut. Juga untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan plagiarisme. Dengan adanya literatur review ini agar memudahkan penulis dalam penyusunan karya ilmiah (skripsi).

Beberapa Literatur Review yang dijadikan sebagai rujukan penulis guna untuk alat bantu dalam penyusunan penelitian, yakni sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Daris	Kerjasama Indonesia-China dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung 2014-2018	Sama-sama membahas mengenai terciptanya sebuah kerjasama bilateral dalam hal ini pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang tidak lepas dari hubungan kedua negara yang telah terjadi selama 65 tahun lebih. Dalam Prosesnya terdapat beberapa kendala seperti perizinan dan pembebasan lahan yang mengakibatkan pembangunan	Penelitian ini membahas tentang bagaimana proyek pembangunan ini dapat membangun juga pusat ekonomi baru di wilayah TOD (Transit Oriented Development) antara Bandung dan Jakarta. Untuk penelitian penulis selain memperbaharui penelitian dari Muhammad Daris ini juga lebih berfokus pada bagaimana proyek ini selain untuk meningkatkan

		<p>proyek ini menjadi terhambat.</p>	<p>mobilitas penduduk Bandung-Jakarta juga bagaimana pembangunan proyek ini dapat membangun dan meningkatkan ekonomi Indonesia di tahun 2021.</p>
<p>Muhammad Yamin dan Sheilla Windymadaska</p>	<p>Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok</p>	<p>Sama-sama mempunyai pokok penelitian tentang pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai mercusuar guna menarik investor asing agar dapat berinvestasi di Indonesia dengan cara pemangkasan</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah penelitian penulis membahas juga latar belakang, keuntungan, diplomasi dan bagaimana pembangunan proyek Kereta Cepat ini dapat membangun</p>

		<p>birokrasi perizinan dan penyederhanaan pelbagai macam peraturan yang dianggap mempersulit investor dalam berinvestasi di Indonesia.</p>	<p>perekonomian Indonesia di tahun 2021.</p>
<p>Oldebes Temy Giantara, Aleksander Purba dan Dwi Herianto</p>	<p>Analisis Ekonomi dan Finansial Kereta Cepat Jakarta-Bandung</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada kelayakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menghitung besarnya nilai NPV, BCR, IRR, PI dan PP sebagai acuannya. Dengan kata lain, penelitian ini</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis ialah berfokus pada diplomasi kerjasama bilateral Indonesia-China dalam pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tahun 2021 dengan menggunakan metode penelitian</p>

		menggunakan metode penelitian kuantitatif.	kualitatif.
--	--	--	-------------

2.2. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan sebuah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian ataupun untuk mendeskripsikan kerangka referensi ataupun teori yang digunakan untuk keperluan mengkaji sebuah permasalahan. Penulis perlu mengemukakan teori serta konsepsi dari para ahli yang bersangkutan dengan objek-objek penelitian untuk menyimpulkan hipotesis dan menjelaskan apa-apa saja variabel-variabel bebas yang terikat dari penelitian ini. Selain itu untuk memahami fenomena-fenomena yang ada pada Hubungan Internasional yang sesuai dengan kaidah serta judul penelitian dari penulis.

2.2.1. Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional secara umum berarti kerjasama yang melibatkan aktor negara baik sebagian maupun seluruh negara. Selain untuk mencapai tujuan tertentu, kerjasama ini juga ditujukan guna tercapainya kepentingan politik luar negeri suatu negara. KJ Holsti dalam *International Politics: A Framework for Analysis* (1967), menjelaskan bahwa kerjasama internasional merupakan,

“....kerja sama internasional merupakan proses di antara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan untuk mencari sebuah pemecahan masalah terhadap masalah yang ada dan dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah masalah tersebut, mencari faktor faktor teknis yang mendukung jalan keluar tertentu. Mengadakan perjanjian perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.”

Kerjasama internasional perlu dilakukan dengan tujuan disamping mencapai kepentingan politik luar negeri suatu negara, juga meningkatkan perekonomian negara sebagai imbas dari berbagai kerjasama di bidang lain, adapun kerjasama internasional juga turut mencegah adanya konflik dan mempererat hubungan antar negara (A. S. Putri, 2019).

2.2.2. Kerjasama Bilateral

Hubungan bilateral merupakan sebuah hubungan politik, ekonomi dan budaya antar dua negara. Umumnya dalam kerjasama internasional hal tersebut dilakukan secara bilateral, contoh-contoh perjanjian ekonomi-politik, pertukaran kedutaan besar, budaya dan kunjungan antar sebuah negara. Hubungan bilateral sifatnya hanya dua negara dikarenakan kata *bi* mengandung arti dua.

Hubungan bilateral yaitu sebuah bentuk hubungan kerjasama (diplomatis) antara satu Negara (NKRI) dengan Negara atau blok Negara lainnya, yang dimana Negara-Negara sahabat tersebut berada di benua atau daratan yang berbeda. Contohnya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan China terkait pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang terkait MRT Jakarta. Hal ini mengacu kepada tujuan kepentingan nasional yang tertera dalam Perpres No. 27/2005 mengenai Tiga Agenda Pembangunan Nasional guna mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan demokratis, serta sejahtera. Hubungan tersebut dijalankan berdasarkan dalam kerangka politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas dan aktif yang didalamnya tertuang prinsip-prinsip *mutual respect* atau saling menghormati dan hubungan yang *mutually beneficial relationship* atau saling menghormati baik melalui pendekatan secara kelompok maupun bilateral (*group and bilateral approach*) (A. S. Putri, 2019).

Jadi pada kerjasama bilateral yang mana letak geografis antara kedua negara yang jauh tidak menjadi hambatan. Belum lagi dengan berbagai keuntungan yang didapat saat melakukan kerjasama bilateral ini sangatlah banyak seperti dapat meningkatkan perekonomian dalam negeri, investasi asing dan lain sebagainya.

2.2.3. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah cerminan dari karakteristik dari sebuah negara dalam upayanya berperan didalam urusan-urusan internasional yang secara eksplisit menunjukkan arah atau tindakan dan sikap suatu negara sebagai instrumen-instrumen yang diperlukan oleh setiap negara dalam melakukan kerjasama hubungan internasional dengan aktor-aktor lainnya. Selanjutnya, pengertian politik luar negeri menurut Prawirasaputra (1984) diartikan sebagai :

“A collection of policies of a country to regulate its foreign relations, foreign policy is part of the national policy and is solely intended to serve the goals that have been set, especially to deal with the period that is being faced and commonly called the national interest. The next is a pattern of attitude or response to the ecological environment. The response has a background that interacts with the perception of experience and natural and cultural wealth which is manifested as a philosophy and is accommodated in the constitution.

Yang artinya Politik luar negeri dengan pemimpin negara lainnya tentu sangat erat kaitannya dengan isu politik luar negeri, pun juga mencuat dan mempengaruhi pemikiran publik dalam memilih presiden. Opini publik lebih mengutamakan isu-isu yang bersifat domestik dibandingkan dengan isu-isu internasional yang secara eksplisit maupun implisit dapat mempengaruhi kualitas kehidupan mereka, misalnya pajak, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak sipil (Roy, 1991).

Politik luar negeri memerlukan tindakan secara nyata melalui diplomasi, keahlian dan kecerdasan diplomasi dalam memperoleh dan mengolah data di lapangan menjadi keahlian khusus yang harus dimiliki, karena itu politik luar negeri bisa dikatakan sebagai substansi, sementara diplomasi merupakan metodenya dalam mencapai kepentingan suatu negara (Roy, 1991).

2.2.4. Skema Bussiness to Bussiness

Pengertian bisnis umumnya tidak terpisahkan dari aktivitas sebuah produksi, jual beli, penjualan serta pertukaran barang maupun jasa yang melibatkan *people-to-people* ataupun perusahaan. Dalam konteks ini, bisnis seringkali dikaitkan dengan apa itu usaha, perusahaan atau organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Tujuan bisnis secara harfiah ialah untuk melayani kebutuhan pelanggan juga untuk memperoleh laba dari apa yang mereka tawarkan.

Istilah *B to B* atau *Bussiness to Bussiness* merupakan salah satu *bussiness model* dari suatu perusahaan yang fokusnya pada penjualan sebuah produk atau layanan-layanan untuk perusahaan lain, tetapi bukan untuk konsumen perorangan. Sederhananya, dalam menjalankan usahanya, perusahaan *B to B* memiliki orientasi untuk menyokong perusahaan lain melalui produk-produk dan layanan yang dimilikinya. Biasanya produk ataupun layanan yang paling umum ditawarkan oleh perusahaan *B to B* ini yakni bahan-bahan mentah baku, suku cadang, layanan pemasaran, layanan konsultasi bisnis dan layanan pengembangan web.

Sebagai contoh dari penerapan skema *B to B* di Indonesia ini yakni perusahaan penghasil produk *Home and Personal Care* serta *Foods & Ice Cream*

di Indonesia Unilever itu salah satu pelanggan dari PT Electronic Data Interchange Indonesia untuk transfer data dalam format standar yang disetujui dari sistem *computer-to-computer* dalam bentuk elektronik. EDI juga berguna untuk pembelian barang serta jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Dan juga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia sendiri merupakan konsorsium 4 yang merupakan BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, serta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Beijing Yawan HSR Co.Ltd sebagai perusahaan pendukung PT KCIC guna pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

2.2.5. Skema Government to Bussiness

Tugas utama dan pokok dari suatu pemerintahan ialah membentuk sebuah *environment* bisnis yang tetap kondusif agar roda-roda perekonomian negara dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan juga dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Diperlukan adanya sebuah relasi yang baik antara negara yaitu pemerintah dengan pebisnis, tidak hanya berorientasi pada hal tersebut tetapi juga untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya. Banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah Indonesia jika terjadi hubungan interaksi yang baik serta efektif dengan pihak swasta.

Implementasi dari skema G to B ini yakni perusahaan wajib membayarkan pajak dengan mudah menjalankan aplikasi pajak berbasis web untuk menghitung besarnya sebuah pajak yang harus dibayar ke pemerintah terkait dan melakukan transaksi secara *online*. Lalu proses tersebut dilanjutkan untuk kebutuhan barang guna kebutuhan sehari-hari lembaga pemerintah dapat dilakukan secara efisien jika konsep semacam *e-procurement* diterapkan. Dan bagi perusahaan yang ingin

melakukan proses *merger* dan *acquisition* dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang ada sesuai dengan aspek-aspek regulasi serta hukum yang ada, dengan berbagai lembaga terkait.

Sebagai contoh hubungan transaksional dari skema G to B yakni pengadaan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang adalah sebuah perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan asing terkait.

2.2.6. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Pada pemerintahan Presiden Jokowi ini, Indonesia mengejar ketertinggalannya melalui pembangunan khususnya di sektor-sektor infrastruktur. Alasan Presiden Jokowi memprioritaskan pembangunan melalui infrastruktur ini sebagai tujuan utama pertumbuhan ekonomi yang juga sejalan dengan penelitian Prof. Demurger, yakni seorang Profesor ekonomi pembangunan dari Universitas Auvergne Perancis pada penelitiannya tahun 2000 yang menyatakan bahwa infrastruktur merupakan faktor utamanya sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintahan Indonesia dengan keterbatasan yang ada seperti biaya tentunya harus menggunakan kerjasama dengan pihak ataupun negara lain yang mampu membiayai dana yang besar. Dalam era Presiden Jokowi kedekatan Indonesia-China semakin erat yang dimana dibuktikan dengan banyaknya kerjasama bilateral di berbagai sektor antar kedua negara. Salah satunya yang menjadi topik

utama pembahasan ini ialah kerjasama Indonesia-China dalam pembangunan *high speed railway* antara Jakarta-Bandung dengan jarak tempuh kurang lebih 142,3 km.

2.3. Hipotesis Penelitian

Dalam pemaparan yang telah penulis lakukan, maka penulis memiliki asumsi utama yakni, “*Proyek kerjasama bilateral Indonesia-China dapat diimplementasikan sesuai Memorandum of Understanding, maka pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia*”.

2.4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan verifikasi atau pembuktian mengenai hipotesis yang telah diambil, maka penulis membuat Verifikasi Variabel dan Indikator agar hipotesis yang telah diambil dapat diverifikasi dengan menggunakan kerangka teoritik sebagai tolak ukur. Untuk verifikasi variabel dan indikator akan dijelaskan lebih lanjut kedalam bentuk tabel berikut,

Variabel	Indikator	Konsep Analisa
Variabel Bebas : Proyek kerjasama bilateral Indonesia-China dapat diimplementasikan	Penandatanganan 7 nota kesepahaman pada kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Beijing, China.	Pada kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Beijing, bersamaan juga dengan pertemuan bilateral kedua delegasi masing-masing

<p>sesuai Memorandum of Understanding.</p>		<p>negara dibuat Pernyataan Bersama Kemitraan Strategis Komprehensif antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China. Disaksikan juga oleh kedua kepala negara, penandatanganan 7 dokumen kerjasama yang salah satunya terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yakni MoU antara Menteri Badan Usaha Milik Negara dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi China untuk pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.</p>
<p>Variabel Terikat : Maka pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung diharapkan dapat meningkatkan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan 	<p>Melalui Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2015, aturan tersebut dikeluarkan dan diberikan tugas khusus</p>

<p>perekonomian Indonesia.</p>	<p>Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ● Pelaksanaan pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 	<p>kepada konsorsium BUMN yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Perkebunan Nusantara VIII lalu ada Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jawa Barat, Bupati Purwakarta, Bupati Bandung Barat dan Walikota Bandung. Berikut Menteri yang termasuk dalam Peraturan Presiden tersebut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Badan Usaha Milik Negara 2. Menteri Perhubungan 3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
--------------------------------	--	--

		<p>Badan Pertanahan Nasional</p> <p>5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lain yang terkait secara berkala setiap 6 bulan selama pembangunan prasarana.</p>
--	--	--

2.5. Skema dan Alur Penelitian



